

PROFIL SKPD

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. NAMA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2. DASAR HUKUM

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

3. SEJARAH PEMBENTUKAN

Nomenklatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mulai digunakan sejak dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

4. ALAMAT KANTOR DAN MEDIA SOSIAL

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah beralamat di:
Jalan Brigjen Katamso No. 2
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
Kota Palangka Raya, 73112
Kalimantan Tengah

Telepon 0536- 3229663

Website : www.dislutkan.kalteng.go.id

Email : dislutkan@kalteng.go.id

Facebook : Dinas Kelautan dan Perikanan Kalteng

Instagram : dislutkankalteng

5. VISI DAN MISI

“Terwujudnya Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah yang Produktif, Berdaya Saing, Inovatif, Kolaboratif dan berorientasi pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan serta Pengelolaan Berkelanjutan”

VISI :

- Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, yakni mewujudkan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab serta terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan;
- Berkelanjutan (*Sustainability*), yakni dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumber daya;
- Ketahanan Pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

MISI :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi dengan tujuan:
 - Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
 - Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.
2. Peningkatan upaya konservasi dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan:
 - Terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;
 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan yang berlaku.

6. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan fungsi perumusan dan pelaksanaan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

7. PROGRAM-PROGRAM

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah Tahun 2023, dilaksanakan melalui program-program pembangunan, dimana program tersebut secara teknis sejalan dengan program kementerian Kelautan dan Perikanan, serta program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sebagai berikut :

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
X	XX	1	101		PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
X	XX	1	102		ADMINISTRASI KEUANGAN
X	XX	1	103		ADMINISTRASI UMUM
X	XX	1	104		PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	02	1,01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1,02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1,03		Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3	25	03	1,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	25	03	1,02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	03	1,03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1,04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
3	25	03	1,05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	03	1,06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
3	25	03	1,07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1,08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
3	25	03	1,09		Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	03	1,10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	25	04	1,01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1,02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	04	1,03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	04	1,04		Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1,05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	1,01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
3	25	05	1,02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3	25	06	1,01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	06	1,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
3	25	06	1,03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

8. INDIKATOR DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	133.136,62	153.747,57*	115,48	Sangat Baik
		Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	108,25	97,00	89,61	Baik
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	128.008,34	129.685,25*	101,31	Sangat Baik
		Jumlah Kebutuhan Benih (ekor)	69.820	70.517*	101,00	Sangat Baik
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (AKI)(kg/kap/tahun)	55,81	56,00*	100,34	Sangat Baik
4	Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	34.761,84	35.213,74*	101,30	Sangat Baik
5	Tercapainya kontribusi sektor kelautan dan perikanan	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,2	4,57	142,81	Sangat Baik

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
	terhadap PDRB (%)					
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	2	2	100,00	Baik
7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	85	100	117,65	Sangat Baik
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	45	202	448,89	Sangat Baik

Keterangan :

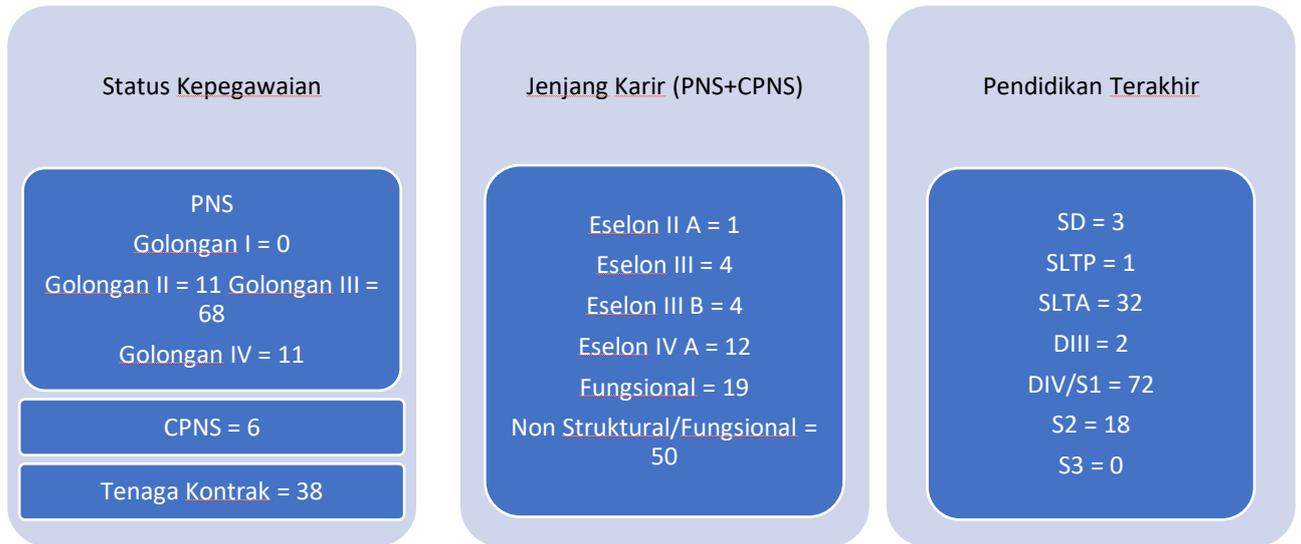
* : merupakan angka sangat sementara yang diolah berdasarkan data dari kabupaten/kota (belum melakukan validasi semester II Tahun 2022).

9. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

- Peraih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif Tahun 2022
- Peraih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif Tahun 2021
- Peraih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif Tahun 2020

10. KEPEGAWAIAN

Pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sampai akhir tahun 2022 berjumlah 128 orang, PNS berjumlah 90 orang dan Tenaga Kontrak berjumlah 38 orang



11. SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat,

Mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, dokumentasi peraturan perundangundangan serta menghimpun bahan pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sekretariat terdiri dari:

- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub. Bagian Keuangan dan Aset

3. Bidang- Bidang, terdiri dari:

- Bidang Kelautan dan Pesisir
Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan, konservasi dan keanekaragaman hayati serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Kelautan dan Pesisir. Bidang ini terdiri dari:

- ✓ Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- ✓ Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan
- ✓ Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

- Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta

pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan, usaha perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perikanan Tangkap. Bidang ini terdiri dari:

- ✓ Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
- ✓ Seksi Usaha Perikanan Tangkap
- ✓ Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
- Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran
Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, standardisasi usaha, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran. Bidang ini terdiri dari:
 - ✓ Seksi Perikanan Budidaya
 - ✓ Seksi Pengolahan dan Pemasaran
 - ✓ Seksi Standarisasi Usaha
- Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan sumber daya kelautan, pengawasan sumber daya perikanan, penanganan pelanggaran, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Bidang ini terdiri dari:
 - ✓ Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan
 - ✓ Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan
 - ✓ Seksi Penanganan Pelanggaran

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah; mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perikanan budidaya air payau dan laut.
- Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah; mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa.
- Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah; mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.

- Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah; mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

